



LAPORAN KEUANGAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
(032.13)
STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN PALU
(649601)

**Periode Yang Berakhir
31 Desember 2025
(Audited)**

**Jl. Garuda No 22 Palu, telp : (0451) 482131
email : skipm.palu@kkp.go.id**



@BKIPMPalu



Bkipm Palu



@bkipmpalu

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil kelautan dan Perikanan Palu adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil kelautan dan Perikanan Palu mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Stasiun PPMHKP Palu. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

CPalu, 5 Mei 2026

Kepala BPPMHKP Palu,



Hanizah, S.Pi, M.Si

NIP 19700701 199903 1 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Pernyataan Tanggung Jawab	iv
Ringkasan	v
I. Laporan Realisasi Anggaran	1
II. Neraca	2
III. Laporan Operasional	3
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	4
V. Catatan atas Laporan Keuangan	5
A. Penjelasan Umum	5
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	13
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	21
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	37
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	44
F. Pengungkapan Penting Lainnya	48
VI. Lampiran dan Daftar	51



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU,
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANANPALU**

JALAN GARUDA NO.22 PALU 94116
TELEPON (0451) 482131 FAKSIMILE (0451) 482131
POSELEKTRONIK ski_mutiara@yahoo.com

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Stasiun Pengendalian dan Pengewasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan tingkat satker selaku UAKPA yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2025 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi serta kinerja keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Palu, 5 Mei 2026

Kepala BPPMHKP Palu,



Samzah, S.Pi, M.Si

NIP 19700701 199903 1 003

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Stasiun PPMHKP Palu 31 Desember 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara pada 31 Desember 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 4.830.000 atau mencapai 9,34 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp51.700.000.

Realisasi Belanja Negara 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 5.341.271.834. atau mencapai 94,05 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp.5.679.097.000.

NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2025.

Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp.14.240.145.538 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp. 59.225.637; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp. 14.180.919.901; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp. 16.399.678 dan Rp. 14.240.145.538.

LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 4.830.000, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp. 5.802.405.788 sehingga terdapat Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp. (5.598.025.741) Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Rp. (5.802.405.788) dan Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa sebesar Rp. (5.807.397.163), sehingga entitas mengalami Surplus/Defisit-LO sebesar Rp. (5.807.397.163).

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2025 adalah sebesar Rp.8.159.035.907 ditambah Surplus/Defisit-LO sebesar Rp. (5.807.397.163), kemudian ditambah dengan Transaksi Antar Entitas senilai Rp. 11.872.107.116 dan Kenaikan/Penurunan Ekuitas sebesar Rp. 6,064.709.953 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp. 14.223.745.860.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2025 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN
STASIUN KIPM PALU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2025
DAN 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATA TAN	31 Desember 2025				31 Desember 2024
		ANGGARAN	REALISASI	Realisasi di atas (di bawah)	%	REALISASI
A. Pendapatan Negara dan Hibah	B.1.					
1. Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	51,700,000	4,830,000	(46,870,000)	9.34	18,779,130
Jum Pendpt Negara & Hibah		51,700,000	4,830,000	(46,870,000)	9.34	18,779,130
B. Belanja Negara	B.2.					
1. Belanja Pegawai	B.2.1.	3,257,154,000	3,135,999,333	(121,154,667)	96.28	1,709,590,139
2. Belanja Barang	B.2.2.	2,421,943,000	2,205,272,501	(216,670,499)	91.05	1,925,301,093
3. Belanja Modal	B.2.3.	-	-	-	0.00	-
4. Belanja Sosial	B.2.4.	-	-	-	0.00	-
Jumlah Belanja Negara		5,679,097,000	5,341,271,834	(337,825,166)	94.05	3,634,891,232

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

STASIUN KIPM PALU NERACA PER 31 Desember 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024
ASET			
Aset Lancar	C.1		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	0	0
Belanja Dibayar Dimuka	C.1.2	0	0
Piutang Bukan Pajak		0	0
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih		0	0
Piutang Bukan Pajak (Netto)		0	0
Persediaan	C.1.3	59,225,637	71,610,929
Jumlah Aset Lancar		59,225,637	71,610,929
Aset Tetap	C.2		
Tanah	C.2.1	8,662,090,000	4,445,700,000
Peralatan dan Mesin	C.2.2	7,250,386,109	3,570,396,599
Gedung dan Bangunan	C.2.3	7,188,682,537	4,921,221,301
Jalan Irigasi dan Jaringan	C.2.4	67,193,000	67,193,000
Aset Tetap Lainnya	C.2.5	0	0
Akumulasi Penyusutan	C.2.6	(8,987,431,745)	(4,892,849,677)
Jumlah Aset Tetap		14,180,919,901	8,111,661,223
Aset Lainnya	C.2		
Aset Lain-lain	C.2.7	0	0
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	C.2.8	0	0
Jumlah Aset Lainnya		0	0
JUMLAH ASET		14,240,145,538	8,183,272,152
KEWAJIBAN	C.3		
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang Kepada pihak Ke tiga	C.3.1	16,399,678	24,236,245
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.3.2	0	0
Uang Muka KPPN	C.3.3	0	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		16,399,678	24,236,245
JUMLAH KEWAJIBAN		16,399,678	24,236,245
EKUITAS	C.4		
Jumlah Ekuitas	C.4.1	14,223,745,860	8,159,035,907
JUMLAH EKUITAS DANA		14,223,745,860	8,159,035,907
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		14,240,145,538	8,183,272,152

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

STASIUN KIPM PALU
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2025
DAN 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)

[illegible]

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
STASIUN KIPM PALU
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2025
DAN 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024
EKUITAS AWAL	E.1	8,159,035,907	10,012,273,017
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(5,807,397,163)	(3,916,792,689)
Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan		-	-
Penyesuaian Nilai Aset		-	-
Penyesuaian Nilai Kewajiban		-	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN		-	-
KEBIJAKAN AKUNTANSI / KESALAHAN			
MENDASAR			
KOREKSI YANG MENAMBAH			
/MENGURANGI EKUITAS		-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.4	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.5	-	-
LAIN LAIN	E.6	-	371
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.7	11,872,107,116	2,063,555,208
KENAIKAN / PENURUNAN ENTITAS		6,064,709,953	(1,853,237,110)
EKUITAS AKHIR		14,223,745,860	8,159,035,907

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Badan Pengendalian dan Pengewasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Palu

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana Strategis*

Stasiun Pengendalian dan Pengewasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Palu yang kemudian disingkat nomenklaturnya menjadi Stasiun PPMHKP Palu didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 23/PERMEN-KP/2015, Stasiun KIPM Palu yang berkedudukan di Jalan Garuda No 22 mempunyai tugas Menyelenggarakan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan serta keamanan hayati ikan. Dalam melaksanakan tugas Stasiun KIPM Palu menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program perkarantinaan ikan, sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan serta keamanan hayati ikan. Kebijakan teknis pada tahun 2019 antara lain pemeriksaan media pembawa dengan organoleptik dan pelaksanaan Inpres 01 Tahun 2017 tentang gerakan masyarakat hidup sehat. Melalui pengawasan terpadu terhadap mutu dan kesehatan pangan.
- b. Pelaksanaan perkarantinaan ikan, sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan serta keamanan hayati ikan.
- c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perkarantinaan ikan, sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan serta keamanan hayati ikan.
- d. Pelaksanaan administrasi UPT BKIPM.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri melalui BKIPM.

Melalui peran Kantor Stasiun KIPM Palu di Sulawesi Tengah diharapkan kualitas Laporan Keuangan Satker dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Periode 31 Desember 2025 dan 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Palu). Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasional keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Basis Akuntansi

A.3 Basis Akuntansi

Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palu menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Perintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan UPT Stasiun KIPM Palu dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah, transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan

dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konsekuensi-konsekuensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palu. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palu adalah sebagai berikut:

Pendapatan- LRA

(1) Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan LO

(2) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan

Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode sewa.

Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan

bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber.

Belanja

(3) Belanja

Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.

Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) ,

Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa,

Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

Aset

5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya

Aset Lancar

a. Aset Lancar

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca,

Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

. Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan Ganti Rugi, apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal,

Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat

direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;

harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;

harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya

Aset Tetap

b. Aset Tetap

Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar

Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);

Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);

Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya, kecuali pengeluaran untuk tanah,

jalan/irigasi jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.

Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

Tanah;

Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan

Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan

Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tatel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya,

Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

ATB disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil, sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2022 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Software	4 tahun
Franchise	5 tahun
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10 tahun
Hak Ekonomi, Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20 tahun

Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70 tahun

Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

Kewajiban Pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Satuan Kerja Stasiun KIPM Palu memperoleh alokasi anggaran Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp5.679.097.000. Selama tahun 2025, dilakukan revisi atas Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Awal sebanyak 7 kali yang disebabkan adanya Penghematan belanja pemerintah berupa Revisi Blokir dan Revisi Buka Blokir, Revisi Penyesuaian POK/penyesuaian halaman III DIPA dan revisi anggaran belanja pegawai. Anggaran awal dan anggaran setelah revisi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Rincian Perubahan DIPA Tahun Anggaran 2025

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2025	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan Jasa	0	0
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi Lainnya	51.700.000	51.700.000
Jumlah Pendapatan	51.700.000	51.700.000
Belanja		
Belanja Pegawai	3.636.585.000	3.257.154.000
Belanja Barang	3.798.467.000	2.421.943.000
Belanja Modal	0	0
Belanja Bantuan Sosial	0	0
Jumlah Belanja	7.435.052.000	5.679.097.000

Realisasi Pendapatan
Rp4.830.000

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp4.830.000 atau mencapai 9,34 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp 51.700.000. terdapat penurunan pendapatan disebabkan target PNBPN ditetapkan kemenkeu T-2 hingga target PNBPN 2025 masih bergabung dengan karantina dan disebabkan perubahan regulasi/tarif, Pendapatan di satuan kerja lingkup Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Palu terdiri dari Pendapatan dari Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan TA 2025
(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
1. Pendapatan jasa karantina perikanan	0	0	0.00
2. Pendapatan pengujian, sertifikasi, kalibrasi dan standarisasi lainnya	51,700,000	4,830,000	9.34
3. Pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah	0	0	0.00
4. Penerimaan kembali belanja Pegawai TAYL	0	0	0.00
5. Pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin	0	0	0.00
Jumlah	51,700,000	4,830,000	9.34

Realisasi Pendapatan Periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 menunjukkan bahwa realisasi pendapatan dari PNBPN pada periode 31 Desember 2025 mengalami Penurunan **(288,80)%** dari realisasi pendapatan Periode 31 Desember 2024. Hal ini disebabkan target PNBPN ditetapkan kemenkeu T-2 hingga target PNBPN 2025 masih bergabung dengan karantina dan disebabkan perubahan regulasi/tarif,

Perbandingan Realisasi Pendapatan
31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(dalam Rupiah)

URAIAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
1. Pendapatan Jasa Karantina Perikanan	-	60,000	100.00
2. Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	-	-
3. Penerimaan kembali belanja pegawai TAYL	-	74,130	-
4. Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung dan Bangunan	-	-	-
5. Pendapatan pengujian, sertifikasi, kalibrasi dan standarisasi lainnya	4,830,000	18,645,000	(286.02)
Jumlah Pendapatan	4,830,000	18,779,130	(288.80)

Realisasi Belanja Rp.
5.341.271.834

B.2 Belanja

Realisasi Belanja instansi pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 5.341.271.834 atau 94,05% dari anggaran belanja sebesar Rp. 5.679.097.000.terdapat blokir anggaran senilai Rp.212.100.000 atau 3,73% sehingga Persentase realisasi Stasiun KIPM Palu 97,70%,Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja 31 Desember 2025

(dalam Rupiah)

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Pegawai	3.257.154.000	3.135.999.333	
Belanja Barang	2.421.943.000	2.205.272.501	
Belanja Modal	0	0	
Bantuan Sosial	0	0	0
Total Belanja Kotor	5.679.097.000	5.341.271.834	94,05
Pengembalian Belanja		-	0
Belanja Netto	5.679.097.000	5.341.271.834	94,05

Realisasi Belanja Per 31 Desember 2025 mengalami Kenaikan sebesar 31,95 persen dibandingkan realisasi belanja 31 Desember 2024. Hal ini dikarenakan antara lain :

1. Kenaikan belanja pegawai disebabkan berpindahnya alokasi anggaran belanja pegawai BPPMHKP Luwuk Banggai beralih ke BPPMHKP Palu
2. Kenaikan belanja barang disebabkan karena perpindahan anggaran BPPMHKP Luwuk banggai ke BPPMHKP Palu.
3. Tidak adanya anggaran belanja modal tahun 2025
4. Tidak adanya bantuan social tahun 2025

Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(dalam Rupiah)

URAIAN	REALISASI PER 31 Desember 2025	REALISASI PER 31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	3,135,999,333	1,709,590,139	45.48
Belanja Barang	2,205,272,501	1,925,301,093	12.70
Belanja Modal	0	0	-
Belanja Bantuan Sosial	0	0	-
Jumlah Belanja	5,341,271,834	3,634,891,232	31.95

Belanja Pegawai Rp.
3.315.99.333

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah

masing-masing sebesar Rp. 3.315.999.333 dan Rp. 1.709.590.139. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja 31 Desember 2025 mengalami Kenaikan sebesar 45,48 persen dari TA 2024. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Berpindahnya alokasi anggaran BPPMHKP Luwuk Banggai ke BPPHKP Palu.

Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai
TA 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024
(dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BELANJA	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik (Turun) %
Belanja Gaji Pokok PNS	993,507,000	652,650,600	34.1
Belanja pembulatan gaji PNS	12,999	10,446	19.1
Belanja Tunj Suami/ Istri	81,580,490	54,108,200	33.1
Belanja Tunj Anak	21,039,444	12,433,370	40.1
Belanja Tunj Struktural PNS	23,760,000	17,280,000	27.1
Belanja Tunj Fungsional	15,120,000	14,705,000	2.1
Belanja Tunj PPh PNS	6,231,480	3,108,440	50.1
Belanja Tunj Beras PNS	53,156,280	36,282,420	31.1
Belanja Uang Makan PNS	148,033,000	92,547,000	37.1
Belanja Tunj Umum PNS	32,765,000	19,095,000	41.1
Belanja Uang Lembur PNS	10,432,000	7,248,000	30.1
Belanja Tunjkin Pegawai PNS	1,362,146,860	786,992,815	42.1
Belanja Gaji Pokok PPPK	146,013,200	8,707,038	94.1
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	2,998	0	100.1
Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	8,026,830	0	100.1
Belanja Tunjangan Anak PPPK	2,524,920	0	100.1
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	2,340,000	0	100.1
Belanja Tunjangan Beras PPPK	8,617,980	0	100.1
Belanja Uang Makan PPPK	33,054,000	0	100.1
Belanja Tunjangan Umum PPPK	6,765,000	0	100.1
Belanja Uang Lembur PPPK	1,224,000	0	(100.1)
belanja Tukin PPPK	179,645,861	4,792,283	97.1
Jumlah Belanja Kotor	3,135,999,342	1,709,960,612	45.1
Pengembalian	9	370,473	
Jumlah Belanja Bersih	3,135,999,333	1,709,590,139	45.1

Belanja Barang Rp
2.205.272.501

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 2.205.272.501 dan Rp. 1.925.301.093 Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2025 mengalami Kenaikan 12,70 persen dari Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2024. Hal ini disebabkan Beralihnya anggaran BPPMHKP Luwuk Banggai ke BPPMHKP Palu..

Perbandingan Realisasi Belanja Barang
31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024
(dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BELANJA	31 Des 2025	31 Des 2024	Naik(Turun %)
Belanja Barang Operasional	705.512.423	430.254.923	39,02
Belanja Barang Non Operasional	18.117.100	29.805.450	(64,52)
Belanja Jasa	712.800.865	547.115.346	23,24
Belanja Pemeliharaan	583.865.924	369.089.135	36,79
Belanja Barang Persediaan	97.806.450	112.033.599	(14,55)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	87.169.739	437.002.640	(401,32)
Jumlah Belanja Kotor	2.205.272.501	1.925.301.093	12,70
Pengembalian belanja	-	-	
Jumlah Belanja Bersih	2.205.272.501	1.925.301.093	12,70

Belanja Modal Rp0

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal pada TA 2025. Hal ini disebabkan tidak adanya anggaran belanja modal tahun 2025

Perbandingan Realisasi Belanja Modal
31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024
(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	%
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	0.00

Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0,00
Belanja Modal Lainnya	0	0	0.00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0.00
Pengembalian Belanja Modal	0	-	-
Jumlah Belanja Modal	0	0	0.00

*Belanja Modal Tanah
Rp0*

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak ada Realisasi Belanja Modal Tanah 31 Desember 2025. Hal ini disebabkan antara lain: Tidak terdapat anggaran Belanja Modal Tanah tahun 2025.

Perbandingan Realisasi Belanja Tanah
31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024
(dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BELANJA	31 Des 2025	31 Des 2024	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0.00
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	0	0	0.00
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	0	0	0.00
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	0	0	0.00
Belana Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	0	0	0.00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0.00
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0.00
Jumlah Belanja Bersih	0	0	0.00

*Belanja Modal
Peralatan dan Mesin
Rp0*

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0. Tidak adanya anggaran belanja modal tahun 2025.

Perbandingan Realiasi Belanja Peralatan dan Mesin
31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BELANJA	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik (Turun) %
N I H I L	0	0	0.0
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0.0
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0.0
Jumlah Belanja Bersih	0	0	0.0

*Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan Rp0*

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Tidak terdapat belanja Gedung dan Bangunan di Kantor satker BPPMHKP Palu pada Tahun 2025.

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan
31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BELANJA	31-Dec-25	31-Dec-24	Naik (Turun) %
N I H I L	0	0	0.00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0.00
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0.00
Jumlah Belanja Bersih	0	0	0.00

*Belanja Modal Jalan,
Irigasi dan Jaringan
Rp0*

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak terdapat anggaran belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun Anggaran 2025.

31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BELANJA	30-Sep-25	30-Sep-24	Naik (Turun) %
N I H I L	0	0	0.00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0.00
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0.00
Jumlah Belanja Bersih	0	0	0.00

*Belanja Modal
Lainnya Rp0*

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak terdapat realisasi belanja modal lainnya per 31 Desember 2025

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya
31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 31 Desember 2025	Realisasi 31 Desember 2024	%
Belanja Modal	0	0	0
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja Modal	0	0	0

*Belanja Bantuan
Sosial Rp0*

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Tidak terdapat realisasi belanja bantuan sosial pada per 30 September 2025.

Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial
31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 31 Desember 2025	Realisasi 31 Desember 2024	%
Belanja Bantuan sosial	0	0	0
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja Modal	0	0	0

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Aset Lancar Rp.
59.225.637

C.1. Aset Lancar

Jumlah Aset Lancar Stasiun PPMHKP Palu per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 59.225.637 dan Rp. 71.610.929

Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp0

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola, dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal Neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada UPT Stasiun KIPM Palu per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0 dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Uang Tunai	0.	0.
Uang di Bank	0.	0.
Kuitansi UP yang belum di SPM kan	0.	0.
Jumlah	0	0

Rincian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada masing-masing Satker disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp0

C.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0. dan Rp0, yang meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan
31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Uang Tunai	0	0
Rekening Bank	0	0
Jumlah	0	0

Kas Lainnya dan
Setara Kas
Rp0

C.1.3. Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

Rincian Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas
30 September 2025 dan 30 September 2024

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	0	0
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	0	0
Kas Lainnya dari Hibah	0	0
Jumlah	0	0

Piutang Bukan
Pajak Rp0

C.1.4. Piutang PNB

Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Rincian Piutang Bukan Pajak
31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Piutang PNB	0	0
Piutang Lainnya	0	0
Jumlah	0	0

Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayaran atau serah terimanya pada akhir tahun anggaran per tanggal Neraca.

Bagian Lancar
Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti
Rugi (TP/TGR)
Rp0

C.1.5. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) merupakan Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan

rincian sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TP/TGR
31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1.		-	-
2.		-	-
3.		-	-
4.		-	-
5.		-	-
6.		-	-
	Jumlah	-	-

Bagian Lancar
Tagihan
Penjualan
Angsuran
Rp0

C.1.6. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Bagian Lancar Tagihan Tagihan Penjualan Angsuran merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Rincian Bagian Lancar TPA untuk masing-masing Satker disajikan sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TP/TGR
31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1.		-	-
2.		-	-
3.		-	-
4.		-	-
5.		-	-
	Jumlah	-	-

Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih – Piutang
Jk. Pendek Rp0

C.1.7. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Pendek

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih BPPMHKP Palu per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0, yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Piutang Jangka Pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang masing-masing debitur.

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih berdasarkan kategori piutang per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jk.
Pendek

(dalam rupiah)

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	0,5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	0,5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	0,5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	-		-

Beban Dibayar di Muka
Rp0

C.1.8. Beban Dibayar di Muka

Beban Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Dibayar di Muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Beban Dibayar di Muka BPPMHKP Palu per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Dibayar di Muka
31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
N I H I L	0	0
	0	0
	0	0
Jumlah	0	0

Pendapatan yang Masih Harus Diterima
Rp0

C.1.9. Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diterima tagihannya. Saldo Pendapatan yang Masih Harus

Diterima UPT Stasiun KIPM Palu per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima
31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

Jenis	31 Desember 2025	31 Desember 2024
N I H I L	0	0
	0	0
Jumlah	0	0

Persediaan
Rp. 59.225.637

C.1.10. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Nilai Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 59.225.637 dan Rp71.610.929 dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Persediaan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No	Persediaan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	Barang Konsumsi	2.173.067	3.049.355
2	Bahan Untuk Pemeliharaan	-	-
3	Suku Cadang	-	11.886.875
4	Pita, Cukai, Materai dan Legis	-	-
5	Bahan Baku	57.052.570	56.674.699
6	Persediaan lainnya	-	-
	Jumlah	59.225.637	71.610.929

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Rincian Mutasi Persediaan

(dalam rupiah)

Saldo per 01 Januari 2025	Rp 71.610.929
Mutasi tambah:	
Transfer Masuk dari UPT Luwuk Banggai	Rp -
Mutasi kurang:	Rp 12.385.292
Transfer keluar	Rp -
Saldo per 31 Desember 2025	Rp 59.225.637
Akumulasi Penyusutan s.d.31 Desember 2025	Rp -
Nilai Buku per 31 Desember 2025	Rp 59.225.637

Aset Tetap

Rp. 14.385.299.948

C.2. Aset Tetap

Saldo Aset Tetap Stasiun PPMHKP Palu per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 14.385.299.948 dan Rp 8,111,661,223

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Aset Tetap pada UPT BPPMHKP Palu berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya.

Tanah

Rp8.662.090.000

C.2.1. Tanah

Tanah yang dimiliki oleh Daerah/Stasiun PPMHKP Palu – per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 8.662.090.000 dan Rp. 4.445.700.000, Transfer Masuk Tanah dikarenakan adanya perpindahan/peralihan asset dari BPPMHKP Luwuk ke BPPMHKP Palu, Sesuai BAST nomor:B.91/SKIPM.LB/PL.520/II/2025 tanggal 17 Februari 2025, Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut:

Rincian Mutasi Tanah

(dalam rupiah)

Saldo per 01 Januari 2025	Rp 4.445.700.000
Mutasi tambah:	
Transfer Masuk dari UPT Luwuk Banggai	Rp 4.216.390.000
Mutasi kurang:	
Transfer keluar	Rp -
Saldo per 31 Desember 2025	Rp 8.662.090.000
Akumulasi Penyusutan s.d.31 Desember 2025	Rp -
Nilai Buku per 31 Desember 2025	Rp 8.662.090.000

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

NO	LOKASI	LUAS	NILAI
1	Palu	1.740 M2	4,445,700,000
2	Luwuk Banggai	1.600 M2	4,216,390,000

Peralatan dan
Mesin
Rp 7.250.386.109

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 7.250.386.109 dan Rp 5.200.909.531. Transfer Masuk Peralatan dan Mesin dikarenakan adanya Transfer Masuk Tanah dikarenakan adanya perpindahan/peralihan asset dari BPPMHKP Luwuk ke BPPMHKP Palu, Sesuai BAST nomor: B.91/SKIPM.LB/PL.520/II/2025 tanggal 17 Februari 2025.

Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan sebagai berikut:

Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

Saldo Per 01 Januari 2025	3.570.396.599
Mutasi Tambah	
Transfer Masuk dari BPPMHKP Luwuk Banggai	3.679.989.510
mutasi kurang	
Penghapusan	-
Transfer keluar	-
Saldo per 31 Desember 2025	7.250.386.109
Akumulasi penyusutan s.31 Desember 2025	(6.688.784.461)
Nilai Buku Per 31 Desember 2025	561.601.648

Rincian Peralatan dan Mesin beserta Akumulasi Penyusutannya per 31 Desember 2025 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

Gedung dan
Bangunan
Rp.
7.188.682.537

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 7.188.682.537 dan Rp 6,194,588,601, Transfer Masuk Gedung dan Bangunan dikarenakan adanya perpindahan/peralihan asset dari BPPMHKP Luwuk ke BPPMHKP Palu, Sesuai BAST nomor: B.91/SKIPM.LB/PL.520/II/2025 tanggal 17 Februari 2025.

Rincian mutasi Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan TA 2025
(dalam rupiah)

Saldo Per 01 Januari 2025	4.921.221.301
Mutasi Tambah	
transfer masuk dari BPPMHKP Luwuk Banggai	2.267.461.236
mutasi kurang	-
Penghapusan	-
Transfer keluar	-
Saldo per 31 Desember 2025	7.188.682.537
Akumulasi penyusutan s.d 31 Desember 2025	(2.073.335.596)
Nilai Buku Per 31 Desember 2025	5.115.346.941

Rincian Gedung dan Bangunan beserta Akumulasi Penyusutannya per 31 Desember 2025 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp 67,193,000

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 67,193,000 dan Rp 94,142,000, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan
(dalam rupiah)

Saldo per 01 Januari 2025	67.193.000
Mutasi tambah:	
Transfer Keluar:	-
Mutasi kurang:	
Saldo per 31 Desember 2025	67.193.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(20.931.641)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	46.261.359

Rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan beserta Akumulasi Penyusutannya per 31 Desember 2025 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

Aset Tetap Lainnya
Rp0

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0 dengan rincian sebagai berikut sebagai berikut:

Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya

(dalam rupiah)

Saldo per 01 Januari 2025	-
Mutasi tambah:	
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2025	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	-

Rincian Aset Tetap Lainnya dan Akumulasi disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

Konstruksi Dalam
Pengerjaan Rp0

C.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0

Rincian KDP pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No.	No. Kontrak	Nilai Kontrak	%	KDP	Ket
1.	NIHIL				
2.					
	Jumlah				

Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
Rp.
(8.783.051.698)

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp (8.783.051.698) dan Rp. (4,892,849,677)

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 September 2025.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
(dalam rupiah)

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Tanah	8.662.090.000	0	8.662.090.000
2.	Peralatan dan Mesin	7.250.386.109	(6.688.784.461)	696.020.040
3.	Gedung dan Bangunan	7.188.682.537	(2.073.335.596)	5.194.077.227
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	67.193.000	(20.931.641)	47,569,586
5.	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
	Jumlah	23.168.351.646	(8.783.051.698)	14.385.299.948

*Piutang Jangka Panjang
Rp0*

C.3. Piutang Jangka Panjang.

Piutang jangka panjang per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0. Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

*Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)
Rp0*

**C.3.1. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) UPT BPPMHKP Palu – per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Rincian Tagihan TP/TGR untuk masing-masing Satker adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Tagihan TP/TGR
31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1.	BPPMHKP Palu	-	-
2.	BPPMHKP Luwuk Banggai	-	-
	Jumlah	0	0

Tagihan
Penjualan
Angsuran Rp0

C.3.2. Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0, berupa penjualan aset tetap yang pembayarannya diselesaikan setelah dua belas bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian TPA per Satker Tahun 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang TPA
31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1.	Stasiun KIPM Palu	-	-
2.	Stasiun KIPM Luwuk Banggai	-	-
	Jumlah	0	0

Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih – Piutang
Jangka Panjang
Rp0

C.3.3. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Stasiun PPMHKP Palu – per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dan Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih atas Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) adalah sebagai berikut.

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jk.
Panjang 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	-	0,5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	0		0

Tagihan TPA			
Lancar	-	0,5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	0		0
Jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0		0

Aset Lainnya
Rp0

C.4. Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya UPT BPPMHKP Palu – per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap.

Aset Tak Berwujud
Rp0

C.4.1. Aset Tak Berwujud

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Rincian Aset Tak Berwujud 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Nilai
1.		0
2.		0
	Jumlah	0

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Adapun mutasi Aset Tak Berwujud pada UPT Stasiun KIPM Palu – adalah sebagai berikut.

Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2025	-
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Saldo Per 31 Desember 2025	-
Amortisasi s.d. 31 Desember 2025	-
Nilai Buku Per 31 Desember 2025	-

Aset Lain-Lain
Rp0

C.4.2. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp.0 dan Rp.0. Aset Lain-lain berupa Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional BPPMHKP Palu – dan Pelaporan Keuangan serta dalam proses penghapusan dari BMN, dan kas BLU yang dibatasi penggunaannya. Adapun mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

Rincian Mutasi Aset Lain-lain

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2025	-
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi dari Aset Tetap	-
Mutasi Kurang:	
Penggunaan kembali BMN yang dihentikan	-
Penghapusan BMN	-
Saldo Per 31 Desember 2025	-
Amortisasi s.d. 31 Desember 2025	-
Nilai Buku Per 31 Desember 2025	-

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya Rp0

C.4.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset Lainnya 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan	Nilai Buku
A.	Aset Tak Berwujud			
1.		0	0	0
2.		0	0	0
	Jumlah	0	0	0
B.	Aset Lain-lain	0	0	0
	Jumlah	0	0	0
	Total	0	0	0

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan

dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

*Kewajiban
Jangka Pendek
Rp 16.399.678*

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Kewajiban Jangka Pendek Stasiun PPMHKP Palu – per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 16.399.678 dan Rp. 24,236,245

*Uang Muka dari
KPPN Rp.0*

C.5.1. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Rincian Uang Muka dari KPPN untuk masing-masing Satker lingkup BPPMHKP Palu adalah sebagai berikut:

Rincian Uang Muka dari KPPN
31 Desember 2025

(dalam rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2025
1.	BPPMHKP Palu	0
2.		0
3.		0
	Jumlah	0

*Utang kepada
Pihak Ketiga Rp.
16.399.678*

C.5.2. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp 16.399.678 dan Rp. 24,236,245 Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada Lingkup UPT BPPMHKP Palu – per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga
31 Desember 2025

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1.	Tagihan Listrik	13.018106	Tagihan Listrik Palu dan Luwuk Bulan Desember
2.	Tagihan Telp/Internet	3.381.572	Tagihan Listrik Palu dan Luwuk Bulan Desember
Total		16.399.678	

Pendapatan
Diterima di Muka
Rp0

C.5.3. Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBK.

Rincian Pendapatan Diterima di Muka dari pihak ketiga disajikan sebagai berikut:

Rincian Pendapatan Diterima di Muka
31 Desember 2025

(dalam rupiah)

Uraian	Jumlah	Keterangan
Jumlah		

Beban yang
Masih Harus
Dibayar Rp
16.399.678

C.5.4. Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 16.399.678 dan Rp. 24,236,245, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar
31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Belanja Layanan Telepon/Internet	3.381.572	2.385.845
Belanja layanan listrik	13.018106	21.727.900
Belanja Layanan PDAM	-	122.500
Jumlah	16.399.678	24,236,245

Utang yang belum
ditagihkan Rp 0

C.5.5. Utang yang belum ditagihkan

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar
31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Kuitansi yang belum SP2D	0	0
Jumlah	0	0

Ekuitas

Rp. 4,428,125,907

C.7 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing- masing sebesar Rp. 4,428,125,907 dan Rp. 8,159,035,907. Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pendapatan
PNBP Rp.
4.830.000

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.4.830.000 dan Rp18.705.000. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak
31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024
(dalam Rupiah)

URAIAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
1. Pendapatan Jasa Sensor Karantina	-	60.000	-100,00
2. Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi	4.830.000	18.645.000	-286,02
3. Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	-	0,00
4. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	-	-	0,00
Jumlah Pendapatan	4.830.000	18.705.000	-287,27

Pendapatan Jasa merupakan pendapatan-LO yang diperoleh dari jasa pemeriksaan laboratorium terhadap produk perikanan yang akan dilalulintaskan. Pada 31 Desember 2025 mengalami Penurunan sebesar (287,27)%. Hal ini disebabkan target PNBP ditetapkan kemenkeu T-2 hingga target PNBP 2025 masih bergabung dengan karantina, dan disebabkan perubahan regulasi/tarif,.

Beban
Pegawai
Rp
3,135,999,333

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 3,135,999,333 dan Rp. 1.709.590.139. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai

31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024
(dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BELANJA	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik (Turun) %
Belanja Gaji Pokok PNS	993.507.000	652.650.600	34,31
Belanja pembulatan gaji PNS	12.999	10.073	22,51
Belanja Tunj Suami/ Istri	81.580.490	54.108.200	33,68
Belanja Tunj Anak	21.039.444	12.433.370	40,90
Belanja Tunj Struktural PNS	23.760.000	17.280.000	27,27
Belanja Tunj Fungsional	15.120.000	14.705.000	2,74
Belanja Tunj PPh PNS	6.231.480	3.108.440	50,12
Belanja Tunj Beras PNS	53.156.280	36.282.420	31,74
Belanja Uang Makan PNS	148.033.000	92.547.000	37,48
Belanja Tunj Umum PNS	32.765.000	18.724.900	42,85
Belanja Uang Lembur	10.432.000	7.248.000	(100,00)
Belanja Tunjkin Pegawai	1.362.146.860	786.992.815	42,22
Belanja Gaji PPPK	207.344.928	7.893.038	96,19
BelanjaUang Lembur PPPK	1.224.000	814.000	(100,00)
belanja Tukin PPPK	179.645.861	4.792.283	97,33
Jumlah Belanja Kotor	3.135.999.342	1.709.590.139	45,48
Pengembalian	9	370.473	
Jumlah Belanja Bersih	3.135.999.333	1.709.219.666	45,50

Beban
Persediaan
Rp
135,770,79
4

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 135,770,794 dan Rp50.677.710 Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan
31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024
(dalam Rupiah)

No	Persediaan	31 Desember 2025	31/31/2024
1	Beban Persediaan Konsumsi	43.693.618	45.180.9
2	Bahan Untuk Pemeliharaan	-	
3	Suku Cadang	-	462.0
4	Pita, Cukai, Materai dan Legis	-	
5	Beban Persediaan bahan baku	92.077.176	5.034.8
6	Persediaan lainnya	-	
Jumlah		135.770.794	50.677.7

Beban
Barang
dan Jasa
Rp 1,428,593,821

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 1,428,593,821 dan Rp 1,013,580,539. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Secara keseluruhan terjadi kenaikan Beban Barang dan Jasa, hal ini disebabkan peralihan anggaran dari UPT BBPMHKP Luwuk Banggai ke BPPMHKP Palu adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa
31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024
(dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	31-Dec-25	31-Dec-24	Naik(Turun) %
Beban Keperluan Perkantoran	464.141.438,	329.464.441	29,02
Beban Penambah daya tahan tubuh	14.980.700,	7.846.000	-
Beban Pengiriman Surat Dinas	5.700.000,	4.255.000	33,96
Beban Honor Operasional Satker	78.770.000,	56.613.600	39,14
Beban Barang Operasional Lainnya	141.920.285,	32.075.882	342,45
Beban Barang Ops - Penanganan Covid19	-	-	-
Beban Bahan	15.117.100,	42.881.695	(64,75)
Beban Honor Output Kegiatan	0,	8.160.000	(100,00)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	3.000.000,	3.000.000	(100,00)
Beban Langganan Listrik	169.126.781,	159.456.671	6,06
Beban Langganan Telepon	67.405.182,	28.777.250	134,23
Beban Langganan Air	190.000,	1.010.000	(81,19)
Beban Sewa	0,	-	-
Beban Jasa Profesi	0,	-	-
Beban Jasa Lainnya	468.242.335,	340.040.000	37,70
Beban Jasa - Penanganan Pandemi Covid-19	-	-	-
Jumlah	1.428.593.821	1.013.580.539	29,05

Beban
Pemeliharaan
Rp 600,865,149

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar 600,865,149 dan Rp369.324.135. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Penurunan biaya pemeliharaan disebabkan adanya efesiensi anggaran

yang berdampak pada pemblokiran anggaran pemeliharaan gedung dan bangunan adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan
31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024
(dalam Rupiah)

No	Beban Pemeliharaan	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik
1	Beban Pemeliharaan Gedung bangunan	308.640.000	197.002.125	
2	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	275.225.924	172.087.010	
3	Beban Persediaan untuk pemeliharaan	5.112.350	235.000	
4	Beban Persediaan suku cadang	11.886.875	-	
Jumlah		600.865.149	369.324.135	

*Beban
Perjalanan
Dinas Rp
87,169,739*

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 87,169,739 dan Rp. 437.002.640. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Penurunan beban perjalanan dinas disebabkan oleh adanya efisiensi dan penghematan anggaran K/L, Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas
31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024
(dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	31-Dec-25	31-Dec-24	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	35.880.263	185.300.140	(416,44)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.050.000	13.200.000	100,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	50.239.476	238.502.500	(374,73)
Jumlah	87.169.739	437.002.640	(401,32)

*Beban
Barang
untuk
Diserahkan
Kepada
Masyarakat
Rp0*

D.7 Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk 30 September 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat
31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024
(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	%
	N I H I L		
Jumlah Beban			

Beban Bantuan Sosial Rp0

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial
31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024
(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	%
	N I H I L		
Jumlah Beban			

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp 214.456.905

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 214.456.905 dan Rp. 355,322,526. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024
(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	134.418.392	233,869,310	
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	78.730.286	118,434,537	
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.308.227	3,018,679	
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	0	
Jumlah Penyusutan	214.456.905	355,322,526	(60,35)
Beban Amortisasi Software	0	0	-
Beban Amortisasi ATB Lainnya	0	0	-
Beban Penyusutan Aset Lain-lain	0	0	-
Jumlah Amortisasi	0	0	-
Jumlah Beban	214.456.905	355,322,526	(60,35)

*Beban
Penyisihan
Piutang
Tidak
Tertagih
Rp0*

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 30 September 2025 dan September 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024
(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	%
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lancar	0	0	0
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Non Lancar	0	0	0
Jumlah Beban	0	0	0

Kegiatan

D.11 Kegiatan Non Operasional

Non Operasional Rp(0) Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional
31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024
(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	%
Pendapatan pelepasan asset non Lancar	-	-	-
Beban pelepasan asset non lancar	-	-	-
Beban dari keg. Non operasional lainnya	-	-	-
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	-	-	-
Jumlah Beban	0	0	0

Pos Luar Biasa Nihil **D.12 Pos Luar Biasa** Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Tidak terdapat pendapatan atau beban dari Pos Luar Biasa untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN

EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp 159.035.907

E.1. Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 8.159.035.907 dan Rp.10.012.273.017

Defisit LO
Rp (5.603.017.116)

E.2. Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah defisit sebesar Rp (5.603.017.116) dan Rp (3,916,792,689) Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi
Rp0

E.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi

Transaksi Dampak Kumulatif Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0.

Penyesuaian Nilai Aset
Rp0

E.1.1. Penyesuaian Nilai Aset

Jumlah Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai Persediaan
Rp0

E.4.2. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0 Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan 31 Desember 2025

No.	Jenis Persediaan	Koreksi
1.	Barang Konsumsi	0
2.	Suku Cadang	0
3.	Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	0
4.	Barang Persediaan Lainnya	0
Jumlah		0

Selisih Revaluasi

E.4.3. Selisih Revaluasi Aset

Aset Rp0

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Koreksi Nilai Aset
Non Revaluasi
Rp0

E.4.4. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp(0).

Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai. Rincian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Aset Non Revaluasi 31 Desember 2025

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Peralatan dan Mesin	-
Gedung dan Bangunan	-
Jumlah	-

Koreksi Lain-lain
Rp0

E.4.5. Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 0 dan Rp. 371

Koreksi ini merupakan koreksi perbaikan penyisihan piutang tidak tertagih. Rincian Koreksi Lain-lain adalah sebagai berikut (Dokumen Terlampi)

Rincian Koreksi Lain-lain 31 Desember 2025

Jenis Koreksi	Jumlah
Koreksi Lainnya	0
Jumlah	0

Transaksi Antar
Entitas
Rp11,872,107,116

E.5. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 11,872,107,116 dan Rp. 2.063.555.208

Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal K/L, antar K/L, antar BUN, maupun K/L dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Transaksi Antar Entitas 31 Desember 2025

Jenis Persediaan	Koreksi
Diterima dari Entitas Lain	(4.830.000)
Ditagihkan ke Entitas Lain	5,341,271,834
Transfer Masuk	6,535,665,282
Transfer Keluar	0
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	11.872.107.116

E.5.1. Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN).

Pada periode hingga 31 Desember 2025, DDEL sebesar Rp.4.830.000 sedangkan DKEL sebesar Rp 5.341,271,834.

E.5.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal K/L, antar K/L, dan antara K/L dengan BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp. 6.534.932.682, yang berasal dari Transfer masuk Aset BPPMHKP Luwuk Banggai ke BPPMHKP Palu terdiri dari:

Transfer Masuk TA 2025

No.	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1.	Aset Tanah, Gedung dan Bangunan dan Peralatan dan Mesin	BPPMHKP Luwuk Banggai	6.534.932.682
Jumlah			

Transfer Keluar TA 2025

No.	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1.			
Jumlah			

E.5.3. Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung K/L dalam bentuk kas, barang, maupun jasa, sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp0 dari total Rp0 yang diterima sepanjang tahun 2025.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 adalah Rp0.

Rincian Pengesahan Hibah Langsung untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Pengesahan Hibah Langsung 31 Desember 2025

No.	Penerima Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Pengesahan
1.		Uang	
		Barang	
Total Pengesahan			
Pengesahan Pengembalian Hibah			-
Jumlah			

Ekuitas Akhir Rp.
14.428.125.907

E.6. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 14,428,125,907 dan Rp. 8,159,035,907

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

) -

F.2 Pengungkapan Lain-lain

-) Terdapat Utang kepada Pihak Ketiga Stasiun KIPM Palu dan Stasiun KIPM Luwuk Banggai sebesar Rp.16.399.678 yang terdiri dari Tagihan Listrik Palu Rp.7.878.824, Tagihan Listrik Luwuk Rp.5.139.282 dan Tagihan Telp/Internet Palu dan Luwuk Rp.3.381.572.
-) Program Prioritas Nasional tahun 2025 yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan lingkup BPPMKP dengan pagu yang telah direvisi senilai Rp. 308.880.000,- dan realisasi sebelum blokir sebesar Rp. 172.789.450,- atau 55,94% dari pagu,terdapat anggran blokir senilai Rp. 135.700.000 atau 43,93%, anggaran setelah blokir Rp. 173.180.000 dan relisasi Rp.172.789.450,- atau 99,87% dengan rincian disajikan pada tabel realisasi anggaran belanja kegiatan Prioritas Nasional (PN) satker BPPMHKP Palu per 30 Juni 2025, terdapat beberapa kegiatan yang tidak terealisasi karena adanya Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya (Blokir).

Tabel 34
Program Prioritas Nasional TA.2025

Rincian Output	Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran
Produk kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang divalidasi	Rp.30.380.000	Rp. 380.000	1,25
Lembaga kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang divalidasi	Rp.80.000.000	Rp. 3,200.000	4,00
UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Rp.20.000.000	Rp. 0	0,00
Rekomendasi	Rp. 129.720.000	Rp.129.713.050	99.99

Kebijakan Parameter uji yang terakreditasi di laboratorium acuan dan penguji sektor kelautan			
Unit kerja yang menerapkan standar sistem pengujian Mutu	Rp. 25.000.000	Rp. 25.000.000	100,00
Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen mutu Laboratorium	Rp. 14.780.000	Rp. 14.496.400	98,08
Unit/Usaha perikanan yang menerapkan quality assurance sesuai standar, sistem dan regulasi	Rp. 9.000.000	Rp. 0	0,00
Total	Rp.308.880.000	Rp. 172.789.450	55,94

Berdasarkan Keputusan Kepala BPPMHKP Palu selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : KEP.065/SKIPM.PALU/KU.110/VII/2025 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Unit Pelaksana Tekhnis (UPT) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan maka Pejabat Pengelola Keuangan Stasiun KIPM Palu sebagai berikut: Pejabat Pembuat Komitmen : Hamzah, S.Pi,M.Si Pejabat Penandatanganan/Penguji SPM: Abdul Rahman, S.AP, Bendahara Pengeluaran : Muchlis, S.AP

) Laporan Capaian Output Yaitu:

Kode	Kegiatan	Belanja			Output				Keterangan
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
032.13.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri								
3989	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan								
3989.PDC.002	Produk kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang divalidasi	30.380.000	380.000	1,25	16	16	Produk	100	
3989.PDF.002	Lembaga kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang divalidasi	80.000.000	3.200.000	4,00	11	11	Lembaga	100	
3989.QIC.002	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	20.000.000	0	0	7	7	Lembaga	100	
7010	Manajemen Mutu								
ABR.001	Rekomendasi Kebijakan Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	5.000.000	0	0	1	1	Rekomendasi Kebijakan	100	
DCC.001	Bimbingan Teknis Peningkatan sistem jaminan mutu hasil kelautan dan perikanan	9.000.000	0	0	1	1	Kegiatan	100	
PBR.001	Rekomendasi Kebijakan Parameter uji yang terakreditasi di laboratorium acuan dan pengujian sektor kelautan perikanan	129.720.000	129.713.050	99,99	1	1	Rekomendasi Kebijakan	100	
PDD.001	Unit kerja yang menerapkan standar sistem pengujian mutu	25.000.000	25.000.000	100	1	1	Lembaga	100	
PDD.002	Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen mutu Laboratorium	14.780.000	14.496.400	98,08	1	1	Lembaga	100	
QIA.001	Unit/Usaha perikanan yang menerapkan quality assurance sesuai standar, sistem dan regulasi	9.000.000	0	0	1	100	Produk	100	
3987	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan								
EBA.962	Layanan Umum	65.609.000	65.458.463	99,77	1	1	Layanan	100	
EBA.994	Layanan Perkantoran	5.206.289.000	5.081.312.654	97,60	1	1	Layanan	100	
EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	21.919.000	21.711.276	99,05	1	1	Dokumen	100	
EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	82.400.000	0	0	1	1	Dokumen	100	
	Subtotal	5.679.097.000	6.341.271.834						
	Penyesuaian (Revisi DIPA/Pengembalian Belanja/dll.)								
	Total	5.679.097.000	6.341.271.834						

*Keterangan: Penyesuaian dijelaskan secara memadai di dalam laporan keuangan

LAMPIRAN - LAMPIRAN